

EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN PIUTANG DANA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM KABUPATEN POHUWATO

Misrah *)

Abstract : This study aims determine the savings and loan management system, determine the development of savings and loan refunds on activities management unit (CGU) in District Buntulia PNPM Pohuwato. The results showed that the system of management of the national community empowerment program (PNPM) in District Buntulia Pohuwato already accomplished in accordance with existing procedures so that funds are available ranging from 2009 to 2010 have been realized or spread throughout poor communities, especially in the group of women who want pioneering venture or want to develop their business better and more developed in the District Buntulia Pohuwato district. PNPM funds are dispersed to the community, especially the women's savings and credit groups in the period 2009-2010 in six villages in kacamatan Buntulian Pohuwato of Rp . 1.449125 billion, the Village Sipatana of Rp . 218 500 000, Village Middle Buntulia of Rp. 221 500 000, North Buntulia Village of Rp.335.000.000, Taluduyunu village of Rp . 194 375 000, North Taluduyunu Desa of Rp . 172 million, Desa Indah Karya Rp. 174 750 000, and Hulawa village of Rp . 133,000,000,

Keywords : Effectiveness , Savings and Loan Accounts

PENDAHULUAN

Melalui program simpan pinjam bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir yang diprogramkan PNPM diharapkan dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, karena program pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir prosedurnya lebih mudah dan ringan diakses masyarakat. Dengan bunga yang rendah dan tanpa jaminan otomatis akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut sebab selama ini kendala terbesar dan paling sulit yang dirasakan masyarakat disaat akan melakukan pinjaman di bank adalah kendala administratif khususnya jaminan dan bunga yang tinggi.

Salah satu hal yang sangat menarik dari program simpan pinjam bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir adalah adanya sistem Tanggung-Renteng apabila terjadi wanprestasi juga pinjaman tersebut

hanya dikhususkan kepada kaum perempuan saja. Namun dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dalam setiap pengeluaran dari suatu program, terlebih lagi yang berhubungan dengan uang. PNPM-MD SPP banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau peminjam antara lain:

1. Pengembalian telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah.
2. Nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang

Penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang di kelola di tingkat Kecamatan oleh lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di lembaga UPK PNPM di Kecamatan Buntulia Kabupaten Powatu dari tahun 2008 sampai tahun 2010 dari laporan keuangan UPK Kecamatan Buntulia. Penelitian ini

dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan lembaga UPK khususnya kegiatan ekonomi dalam pengelolaan pinjaman berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam pada unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Buntulia ?
2. Bagaimana perkembangan pengembalian dana simpan pinjam pada unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Buntulia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana simpan pinjam pada unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Buntulia
2. Untuk mengetahui perkembangan pengembalian dana simpan pinjam pada unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Buntulia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Memperhatikan akar kata "miskin" yang disebut di atas, berarti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha (Quraish Shihab) Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.

Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah*, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Huud ayat 6.

Artinya: *Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya*²⁵. *Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (Q.S. Huud: 6)*

Ayat ini menjamin siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, maka Allah akan memudahkan jalan rezekinya, dan tidak hanya diam menanti datangnya rezeki. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkat permukaan, atau untuk menemukan alternatif pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap kufur.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat Pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan PNPM Mandiri

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*).
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, Pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas Pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat. Adapun pembangunan yang berbasis masyarakat bermuara pada:

1. Menggunakan Kecamatan/desa sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

- Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Dasar Hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri mengacu pada landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang akan disusun kemudian.

Pengertian Kredit Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan. Perkembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam pembangunan melalui

| No | Jabatan | Jumlah (orang) | Ket |
|---------------|---|----------------|-----|
| 1. | Ketua kelompok | 87 | |
| 2. | Karyawan PNPM | 3 | |
| 3. | Masyarakat Penerima Bantuan Modal Usaha di Desa Sipatana, Buntulia Tengah, hulaya, dan Karya Indah. | 397 | |
| Jumlah | | 487 | |

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Jumlah sampel berdasarkan pendapat Roscoe seperti dikutip Sekaran (2000) bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 telah

penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dengan tujuh (7) desa yaitu Buntulia tengah, Buntulia utara, Taluduyunu, Taluduyunu Utara, Karya indah, Hulawa dari tahun 2009 samapai tahun 2010.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1). Observasi, (2). Dokumentansi, (3). Wawancara

Jenis dan Sumber Data

Demi memperoleh data yang valid maka ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1). Data primer, (2). Data sekunder

Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan UPK dan seluruh masyarakat penerima dana Program nasional pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

mencukupi untuk digunakan dalam semua penelitian. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan *Convenience sampling* yaitu pengambilan sampel responden dari sampel/orang yang mudah ditemui dilokasi penelitian.

Jadi sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah karyawan, para ketua kelompok dan masyarakat penerima dana simpan pinjam di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Metode Analisis

Menurut Moleong (2006:6) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan usaha kecil dan menengah masyarakat di Kecamatan Buntulia melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya pada program simpan pinjam kelompok perempuan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Keadaan Geografis

Kecamatan Buntulia merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kecamatan Buntulia merupakan pecahan dari kecamatan Marisa. Kecamatan dengan luas wilayah 376,54 km² ini berbatasan dengan kabupaten Buol, Sulawesi Tengah di sebelah utara, kecamatan Marisa di sebelah timur, kecamatan Duhiadaa di sebelah selatan serta kecamatan Patilanggio di sebelah barat. Kecamatan Buntulia sebagian besar

merupakan daerah dataran, perbukitan, dan daerah aliran sungai. Jika dilihat dari luas wilayahnya, maka desa yang memiliki luas terbesar adalah desa Hulawa dan desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah desa Sipatana.

Pemerintahan

Kecamatan Buntulia terdiri dari 7 desa yaitu Buntulia Utara, Taluduyunu, Hulawa, Buntulia Tengah, Karya Indah, Sipatana, dan Taluduyunu Utara. Menurut bagian pemerintahan Kecamatan Buntulia status pemerintahan desa-desa di Buntulia adalah desa, dan jika dilihat dari status hukumnya semua desa di Buntulia sudah tergolong definitif dan sebagian besar merupakan desa swadaya.

Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Buntulia pada tahun 2008 adalah 9.480 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 4.847 jiwa dan penduduk perempuan 4.533 jiwa. Kepadatan penduduk Buntulia pada tahun 2008 sebesar 25 jiwa per km². Desa yang paling padat penduduknya adalah Sipatana yaitu 345 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Hulawa adalah 6 Jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk Buntulia adalah 105. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki, atau dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki Buntulia lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Buntulia bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Kualitatif Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM) di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Perencanaan

Perencanaan (*planning*) menyangkut rencana kerja dan bagaimana mengerjakannya dengan hasil rencana (*plan*). Fungsi perencanaan di masyarakat mandiri untuk tiap Desa dampingan dilaksanakan oleh pendamping mitra. Rencana yang dibuat oleh pendamping mitra adalah berasal dari bahan yang diperoleh dari survei, identifikasi sasaran, dan studi kelayakan mitra (SKM). Setelah dilakukan survei, identifikasi, dan studi kelayakan mitra. Masyarakat mengajukan proposal usahanya ke Desa.

”Masyarakat yang ingin mengajukan dana usaha program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri harus membuat proposal pengajuan dana PNPM Mandiri ketingkat Kecamatan, kemudian di Kecamatan semua proposal pengajuan dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri diseleksi dari semua Desa yang mengajukan Dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang ada di kecamatan Buntulia (wawancara dengan salah satu karyawan, 07 November 2011).

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri ditinjau dari aspek perencanaan sudah efektif karena adanya partisipasi dari masyarakat, mitra pendamping, dan pemerintah.

Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) adalah aktivitas setelah rencana dimiliki, pendamping mitra (PM) harus mampu melakukan aktivitasnya berdasar atas rencana untuk mewujudkan atau realisasi rencana. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ini diharapkan apa yang

telah diusahakan dapat berjalan seoptimal mungkin.

”Tindakan Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dapat kita lihat dengan adanya bantuan ataupun program Pemerintah dalam mengupayakan pemberdayaan UKM ini, misalnya Pemerintah mengupayakan program Masyarakat Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri, semua itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan UKM yang diupayakan Pemerintah. (wawancara dengan Ketua kelompok Sipatana, Buntulia Tengah, hulaya, dan Karya Indah).

Dalam implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri eksistensi pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyediakan perangkat regulasi proses sosialisasi, pengajuan proposal, verifikasi, dan keputusan pemberian modal usaha kepada masyarakat di desa Sipatana, Buntulia Tengah, hulaya, dan Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato serta proses evaluasi program.

Pembinaan

Salah satu bentuk untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya usaha mitra adalah dengan mengadakan pembinaan-pembinaan secara intensif dan terarah. Pembinaan yang berasal dari kata bina berarti merubah sesuatu sehingga menjadi baru, memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, serta menjadi lebih baik dan bermanfaat.

“Dalam realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM) mandiri untuk sektor UKM upaya pembinaan bukan hanya dilakukan pada pra mendapatkan bantuan modal usaha tetapi pasca bantuan pendampingan dan pembinaan terus dilakukan mitra pendamping secara terus menerus. Dalam proses ini kendala utama yang dihadapi adalah mindset masyarakat yang lebih cenderung konsumtif dari pada produktif, sehingga bantuan modal usaha itu kurang efektif pemanfaatannya untuk pengembangan usaha. (wawancara salah satu karyawan UPK, 01 November 2011).

Analisis Deskriptif Kualitatif Pengembalian Dana Simpan Pinjam Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan usaha simpan pinjam kelompok perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat di kecamatan Buntulia kabupaten Pohuwato adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana program nasional pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha simpan dari dan untuk anggota, calon anggota, dan atau anggotanya (PP No 9 Tahun 1995). Perkembangan pengembalian usaha simpan pinjam yang berhasil diidentifikasi pada laporan perkembangan pinjaman kelompok perempuan (SPKP) di kecamatan Buntulia dengan enam desa yaitu: desa Sipatana, Buntulia Tengah, Buntulia Utara, Taluduyunu, Taluduyunu Utara, Karya Indah, Hulawa dapat dilihat pada tabel lampiran tentang laporan perkembangan pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan adalah:

Desa Sipatana

Dari hasil penelitian terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman yang terealisasi pada tahun 2009 sebesar Rp.93.000.000 dengan tujuh kelompok penerima pinjaman yaitu kelompok

arida1 sebesar Rp.1 25.000.000, kelompok arida 2 sebesar Rp.12.000.000, kelompok arida 3 sebesar Rp.8.000.000, kelompok arida 4 sebesar Rp.14.000.000, kelompok arida 5 sebesar Rp.10.000.000, kelompok arida 8 sebesar Rp. sebesar Rp.7.000.000, kelompok arida 9 sebesar Rp.17.000.000. dari realisasi pinjaman ada penunggakan pengembalian oleh kelompok arida 1 pada angsuran di atas 6 kali angsuran sebesar Rp.14.583.500, kelompok Arida 2, 3 dan 4 terjadi penunggakan pada angsuran yang sama yaitu 5 sampai 6 kali angsuran sebesar Rp. Rp. 6.000.000, Rp. 3.537.800 dan Rp. 6.172.800. dan kelompok Arida 8 dan 9 juga terjadi penunggakan pada angsuran yang sama Rp. 2.333.600 dan Rp. 5.666.400 yaitu pada angsuran 3 sampai 4 kali angsuran. sedangkan jumlah alokasi pinjaman yang terealisasi pada pada tahun 2010 sebesar Rp. 79.500.000 dengan empat kelompok yaitu: kelompok arida x sebesar Rp 20.000.000,- arida VII sebesar Rp 20.000.000,- kelompok arida v sebesar Rp. 19.500.000,- dan kelompok arida XI sebesar Rp. 20.000.000,- Melihat laporan kolektibilitas pinjaman SPP pada tahun 2010 terjadi penunggakan pada klp. Arida V dengan angsuran 3 sampai 4 kali angsuran sebesar Rp. 6.500.000 dan Arida VII dan XI menunggak 5 sampai 6 kali angsuran sebesar Rp.10.002.000 dan Rp. 10.301.000.-

Desa Buntulia Tengah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah alokasi pinjaman yang terealisasi pada tahun 2009 di desa Buntulia tengah sebesar Rp.79.000.000,- dengan tujuh kelompok penerima pinjaman yaitu Kelompok Al Ihlas sebesar Rp. 15.000.000,- Kelompok Bina bersama sebesar Rp. 9.000.000,- Kelompok Dahlia 2 sebesar Rp.9.000.000,- Kelompok Mawar sejati1 sebesar

Rp.20.000.000,- Kelompok Maju bersama2 sebesar Rp.7.000.000,- Kelompok Mari berkarya sebesar Rp.7.000.000, Kelompok Melati 3 sebesar Rp.12.000.000 dengan realisasi pengembalian sebesar Rp. 20.347.000 atau sekitar 84% dari target pengembalian akumulatif unit pengelola kegiatan kecamatan Buntulia sedangkan pada tahun 2010,

Melihat laporan kolektibilitas pinjaman SPP pada unit pengelola kegiatan di kecamatan Buntulia adalah sebagai berikut: Desa Buntulia Tengah ada 7 kelompok yang mengalami penunggakan, enam kelompok diantaranya menunggak 1 sampai 2 kali angsuran yaitu kelompok Al-Ihlas Rp. 1.833.200,- kelompok Bina bersama sebesar Rp. 1.761.700,- kelompok mawar sejati 1 sebesar Rp. 3.333.000,- kelompok maju bersama 2 sebesar Rp. 650.700,- kelompok mari berkarya sebesar Rp. 584.000,- kelompok melati 3 sebesar Rp. 2.000.000,- dan kelompok dahlia 2 menunggak 3 sampai 4 kali angsuran sebesar Rp. 2.250.000,-

Desa Buntulia Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman yang terealisasi pada tahun 2009 di Desa Buntulia Utara sebesar Rp.116.000.000,- dengan sembilan (9) kelompok penerima pinjaman yaitu Kelompok Mawar 5 sebesar Rp. 16.000.000,- Kelompok. Mekar Jaya sebesar Rp. 13.500.000,- Kelompok Hikma sebesar Rp. 14.000.000,- Kelompok Mawar 2 sebesar Rp. 15.000.000,- Kelompok damai sejahtera sebesar Rp. 7.000.000,- Kelompok Indah lestari sebesar Rp. 10.000.000,- Kelompok Mawar 3 sebesar Rp. 13.500.000,- Kelompok Mawar 4 sebesar Rp. 10.000.000,- Kelompok Mawar 1 sebesar Rp. 17.000.000. dengan melihat kolektibilitas pinjaman SPP pada unit pengelola

kegiatan (UPK) terjadi penunggakan 1 sampai 2 kali angsuran pada kelompok mawar 5, mawar 4 dan mawar 1 sebesar Rp. 6.948.100, dan penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran pada kelompok hikma, mawar 2, damai sejahtera, dan mawar 2 sebesar Rp. 16.245.100, penunggakan 5 sampai 6 kali angsuran pada kelompok pada kelompok mekar jaya sebesar Rp. 5.625.000 dan penunggakan angsuran diatas 6 kali angsuran pada kelompok indah lestari sebesar Rp. 5.481.500,-

Dan pada tahun 2010 dana yang terealisasi sebesar Rp. 112.000.000,- dienam kelompok penerima dana pinjaman yaitu: Kelompok Mawar 6 sebesar Rp. 20.000.000,- Kelompok Mawar 7 sebesar Rp. 16.000.000,- Kelompok Mawar 8 sebesar Rp.8.500.000,- Kelompok Mawar 9 sebesar Rp. 20.000.000,- Kelompok Mawar 10 sebesar Rp.19.000.000,- Kelompok Mawar 11 sebesar Rp. 19.000.000,- dengan melihat laporan kolektibilitas pinjaman SPP di Kecamatan Buntulia Utara pada tahun 2009 penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran pada kelompok mawar 6 sebesar Rp. 7.499.600,- penunggakan 5 sampai 6 kali pada kelompok mawar 7, mawar 9 dan mawar 10 dengan jumlah dana sebesar Rp.24.056.700, dan penunggakan pembayaran diatas 6 kali angsuran ada kelompok indah lestari sebesar Rp. 5.481.500,-

Desa Taluduyunu

Dari tabel laporan perkembangan pinjaman SPKP di atas terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman PNPM kelompok perempuan yang terealisasi pada tahun 2009 di desa Taluduyunu sebesar Rp. 62.000.000,- dengan enam kelompok penerima dana pinjaman yaitu kelompok Pancaran berkah sebesar Rp. 10.500.000, Maju bersama sebesar Rp. 15.000.000,- kelompok

Mandiri sebesar Rp. 8.000.000,- kelompok Berkarya sebesar Rp. 9.000.000,- Sejahtera sebesar Rp. 10.000.000 dan kelompok Setia sebesar Rp. 9.500.000,- Dengan melihat laporan kolektibilitas pinjaman SPP, pada tahun 2009 bahwa penunggakan 1 sampai 2 kali angsuran pada kelompok pancaran berkah dan maju bersama dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.537.000,- penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran pada kelompok berkarya dan kelompok setia dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 4.393.200, dan penunggakan 5 sampai 6 kali angsuran pada kelompok mandiri dan kelompok sejahtera dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.936.600,-

Pada tahun 2010, dana yang terealisasi di desa Taluduyunu sebesar Rp. 58.875.000, pada 3 kelompok desa penerima dana PNPM Mandiri yaitu kelompok Kelompok Merpati sebesar Rp. 120.375.000,- Kelompok Merpati 2 sebesar Rp. 20.000.000,- Kelompok Merpati 3 sebesar Rp. 18.500.000,- dengan laporan kolektibilitas pinjaman SPP pada Unit pengelola kegiatan bahwa penunggakan dana pinjaman yang terjadi sebesar Rp. 43.106.000,-

Desa Taluduyunu Utara

Dari tabel laporan perkembangan pinjaman SPKP di atas terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman PNPM kelompok perempuan yang terealisasi pada tahun 2009 di desa Taluduyunu Utara sebesar Rp. 68.000.000,- pada 7 kelompok desa penerima pinjaman di antaranya adalah, kelompok Anggrek 3 sebesar Rp. 8.000.000,- Kelompok Anggrek 4 sebesar Rp. 12.000.000,- Kelompok Anggrek 6 sebesar Rp. 10.000.000,- Kelompok Anggrek 7 sebesar Rp. 11.000.000,- Kelompok Anggrek 8 sebesar Rp. 11.000.000,- Kelompok Anggrek 9 sebesar Rp. 10.000.000,- Kelompok Anggrek 11

sebesar Rp.6.000.000,- dengan kolektibilitas pinjaman SPP pada tahun 2009 penunggakan yang terjadi di desa Taluduyunu Utara dengan tujuh (7) kelompok peminjam sebesar Rp. 21.600.100,-

Pada tahun 2010 dana yang terealisasi sebesar Rp. 60.000.000, di tiga kelompok penerima dana pinjaman di desa Taluduyunu utara, yaitu kelompok Anggrek 1 sebesar Rp. 20.000.000, Klp. Anggrek 5 sebesar 20.000.000, dan Klp. Anggrek 10 sebesar 20.000.000, dengan melihat perkembangan laporan kolektibilitas pinjaman SPP di UPK kecamatan Buntulia terjadi penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran pada kelompok anggrek II sebesar Rp.6.668.000,- dan penunggakan 5 sampai 6 kali angsuran pada kelompok anggrek 1 dan anggrek 10 sebesar Rp.9.668.000 dan Rp.9.137.300,-

Karya Indah

Dari tabel laporan perkembangan pinjaman SPKP di atas terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman PNPM kelompok perempuan yang terealisasi pada tahun 2009 di desa karya indah sebesar Rp. 33.750.000 yaitu Kelompok Melati 1 sebesar 11.250.000,- Kelompok Melati 2 sebesar 10.500.000,- dan Kelompok Melati 3 sebesar Rp. 12.000.000,- Dengan melihat laporan kolektibilitas pinjaman terjadi penunggakan 1 sampai 2 angsuran sebesar Rp. 4.164.100,- yaitu kelompok melati I sebesar Rp. 937.500,- melati 2 sebesar Rp. 1226.000,- dan kelompok melati III sebesar Rp. 2.000.000,-

Pada tahun 2010 dana yang terealisasi sebesar Rp. 64.000.000 di desa karya indah yaitu pada kelompok melati 4 sebesar Rp. 24.000.000,- kelompok melati 5 sebesar Rp. 24.000.000, dan kelompok 6 sebesar Rp. 16.500.000,- dengan melihat perkembangan kolektibilitas pinjaman di UPK Kecamatan Buntulia terjadi

penunggakan 1 sampai 2 kali angsuran pada kelompok melati 4 yaitu sebesar Rp. 3.321.900,- dan melati 5 dan 6 terjadi penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran sebesar Rp. 10.002.000,-

Dari tabel laporan perkembangan pinjaman SPKP di atas terlihat bahwa jumlah alokasi pinjaman PNPM kelompok perempuan yang terealisasi pada tahun 2009 di desa Hulaya sebesar Rp. 23.000.000, yaitu pada kelompok Mawar 1B sebesar Rp. 14.000.000,- dan Klp. Mawar 6 sebesar Rp.9.000.000,- dengan melihat kolektibilitas pinjaman terjadi penunggakan 1 sampai 2 kali angsuran sebesar Rp. 2.333.000,- dan kelompok mawar 6 menunggak 5 sampai 6 kali sebesar Rp. 4.500.000,-.

Pada tahun 2010 dana yang terealisasi di desa Hulaya sebesar Rp. 80.000.000,- dengan empat kelompok penerima dana pinjaman, yaitu Kelompok Teratai 4 sebesar Rp. 20.000.000,- Kelompok Teratai 3 sebesar Rp. 20.000.000,- Kelompok Teratai 2 sebesar Rp. 20.000.000,- dan Klp. Teratai 1 sebesar Rp. 20.000.000,- Dengan melihat perkembangan kolektibilitas pengembalian pinjaman pada desa Hulaya terjadi penunggakan 3 sampai 4 kali angsuran pada kelompok teratai 4, sebesar Rp. 7.360.000, teratai 3 sebesar Rp. 5.001.000, dan teratai 2 sebesar Rp. 6.668.000, dan kelompok teratai 1 terjadi penunggakan 5 sampai 6 kali angsuran sebesar Rp. 8.531.700, _

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis laporan perkembangan keuangan pada Unit pengelola kegiatan di kecamatan Buntulia kabupaten pohuwato, maka penulis dalam pembahasan ini membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM) di Kecamatan Buntulia sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dana yang tersedia mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2010 sudah terealisasi atau tersebar ke seluruh masyarakat miskin khususnya pada kelompok perempuan yang ingin merintis usaha atau ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan lebih berkembang di Kecamatan Buntulia kabupaten pohuwato.

Dana PNPM yang tersebar ke masyarakat khususnya pada simpan pinjam kelompok perempuan pada periode 2009-2010 pada enam desa di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 1.449.125.000,- yaitu Desa Sipatana sebesar Rp. 218.500.000,- Desa Buntulia Tengah sebesar Rp. 221.500.000,- Desa Buntulia Utara sebesar Rp.335.000.000,- Desa Taluduyunu sebesar Rp. 194.375.000,- Desa Taluduyunu Utara sebesar Rp. 172.000.000,- Desa Karya Indah sebesar Rp. 174.750.000,- dan Desa Hulawa sebesar Rp. 133.000.000,-

Dana pinjaman Simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) Mandiri yang tersebar di tujuh (7) Desa yang ada di Kecamatan Butulia Kabupaten Pohuwato merupakan dana yang di pinjamkan sekaligus kepada masyarakat miskin khususnya kelompok perempuan untuk di kembangkan dan kemudian mengembalikannya secara beransur kepada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Hasil laporan kolektibilitas pinjaman SPP pada unit pengelola kegiatan (UPK) di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato periode 2009/2010 menyatakan bahwa angsuran masyarakat yang masuk ke unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan Buntulia belum maksimal, itu terlihat dari ke tujuh (7) desa yang ada di

kecamatan Buntulia dana yang masuk ke unit pengelola kegiatan sampai pada bulan ini belum mencapai 100%. Di desa Sipatana dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini sebesar Rp. 65.310.400,- atau sekitar 44%, dari dana yang tersebar ke masyarakat, desa Buntulia tengah dana yang berhasil kembali sebesar Rp.91.408.200,- atau sekitar 66% dari dana yang tersebar di masyarakat, desa Buntulia Utara dana yang berhasil kembali sebesar Rp. 112.052.000,- atau sekitar 56%, desa Taluduyunu dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini sebesar Rp. 65.879.200 atau sekitar 61% dari dana yang ada, desa Taluduyunu Utara dana yang berhasil kembali sebesar Rp. 64.186.600,- atau sekitar 57% dari dana yang tersebar ke masyarakat, desa Karya Inda dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini adalah Rp. 65.268.000 atau sekitar 79% dan desa Hulawa dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini adalah Rp. 44.254.300,- atau sekitar 56% dari dana yang tersebar ke masyarakat dari hasil rekapitulasi pada Unit pengelola kegiatan sampai pada bulan ini dana yang tersebar di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.1.449.125.000,- sedangkan angsuran dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) yang masuk dari masyarakat sampai pada bulan ini sebesar Rp.508.358.700,- tambah bunga 111.588.250, sehingga dana yang kembali sebesar Rp. 619.946.950,- atau sekitar 59% dari jumlah dana yang terpinjam, sedangkan dana yang masih tersimpan atau dana yang menunggak di masyarakat sampai pada bulan ini adalah Rp. 940.766.300,-

Salah satu program pemerintah saat ini yang terealisasi adalah program nasional pemberdayaan masyarakat khususnya dana simpan pinjam kelompok perempuan yang tersebar di kecamatan Buntulia Kabupaten

Pohuwato, dimana dana ini diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu, agar tingkat pengembaliannya bisa optimal sesuai dengan harapan. Dengan kenyataan yang ada dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang terealisasi di masyarakat menghadapi beberapa hambatan atau risiko dalam pengembalian dana tersebut diantaranya keterlambatan waktu pembayaran atau tidak kembalinya dana pinjaman di kecamatan Buntulia kabupaten Pohuwato.

Dari hasil wawancara atau interviw dari beberapa masyarakat penerima dana pinjaman, ketua kelompok, dan beberapa karyawan pada unit pengelola kegiatan (UPK) di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato menyimpulkan bahwa terjadinya tunggakan pembayaran dana pinjaman program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) adalah kurangnya pemahaman dan pengertian masyarakat, adanya kebutuhan yang penting dari pada membayar angsuran, dan adanya penyalahgunaan angsuran yang masuk pada ketua kelompok dari masing-masing desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis telah berhasil menemukan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan karya ilmu ini sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan dana dalam hal ini perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan program nasional pemberdayaan masyarakat pada unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada
2. Penunggakan pembayaran yang terjadi di kecamatan Butulia

kabupaten Pohuwato disebabkan karena tidak adanya pemahaman dari masyarakat tentang risiko yang dihadapi dari penunggakan pembayaran, adanya keperluan masyarakat yang lebih penting dari pembayaran angsuran Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan adanya penyalahgunaan angsuran dana dari beberapa ketua kelompok dari masing-masing desa di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Saran

Untuk mendukung keberhasilan suatu program, yang mana kita tahu bahwa program itu juga baru berjalan beberapa tahun belakangan ini setidaknya harus mendapat perhatian serius dari pihak yang terkait. Pengenalan program tidak hanya dilakukan beberapa waktu saja, namun program yang berskala Nasional harus menjadi perhatian khusus, sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat umum lebih diarahkan pada pendekatan partisipatif dan pendekatan dengan konsep kewirausahaan, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengenal dan mendalami apa yang sebenarnya dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan program ini akan terlaksana sesuai tujuan yang diinginkan yaitu “meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya. 2009. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema

Ana Budi Rahayu, MG. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui*

pemberdayaanmasyarakatdesa a
www.binaswadaya.org/files/Pemberdayaan-an-masyarakatdesa.pdf. (online) diakses 20 Oktober 2011.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Eko,Sutoro.*PemberdayaanmasyarakatDesa*,http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_masyarakat_desa.pdf (online) diakses 20 Oktober 2011.

Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*.Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurhajati. 2005. *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi*. Malang: UNISMA.

Pamungkas, Sigit. 2003. *Evaluasi Program Pemberdayaan MM-DD*. Bogor: FP-IPB

- Pedoman Umum. 2007. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri.
- Rahayu, Iin Tri dan Tristiadi Ardi Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayu Media.
- Rokhana, A, Ninik. 2005. Hubungan Antara Pendapatan Keluarga dan Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi anak Balita di Betokan Demak. Dalam Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. (online) <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Ekonomi1.html> diakses 20 Oktober 2011.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.
- _____. 2009. *PNPM Mandiri Pedesaan (online)* id.wikipedia.org diakses 20 Oktober 2011.
- _____. 2009. *PNPM Mandiri (Online)* http://www.pnpmMandiri.org/index.php?option=com_search&searchword=engatakan diakses 20 Oktober 2011.
- _____. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. http://www.kalteng.go.id/INDO/pemberdayaan_masyarakat at 2003.htm 20 Oktober 2011
- *) **STIE Ichsan Pohuwato, Jl. Trans Sulawesi No. 47 Marisa Pohuwato Gorontalo**
e-mail :misrahsosim@gmail.com